
DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 50 DAN PSAK 55 PADA LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN

Sri Luna Murdianingrum, Marita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
email: luna_sri@ymail.com, Marita_farid@yahoo.com

ABSTRACT

IAS 50/55 will be applied for financial statements beginning on January 1, 2009. However, there are several obstacles faced by compilers of financial statements, DSAK-IAI decided to change the effective date of the implementation of SFAS 50 and 55 (Revised 2006) be for periods beginning after January 1, 2010. The purpose of this study was constraints and the impact of the adoption of IAS 50 and 55 on the financial statements of banks. This study was performed to all banks listed in the Indonesian capital market. The total number of companies listed in the stock market some 31 banks. This research was conducted with the observation period 2009 to 2014 then for 6 years is a period of observation, so that data is numbered 186 in the form of financial statements annual report. The results of this study concluded that one of the challenges faced by banks in the implementation of IAS 55 is inadequate historical data held for calculating collective impairment (collective impairment). Besides obstacles in the implementation of SFAS 50 ,55 (revised 2006), among others, information systems, accounting policies, the availability of data, human resources, financial statement comparability, availability of data, feeding the data and time reporting.

Keyword: SFAS No. 50 (Revised 2006), SFAS No. 55 (Revised 2006), the impact of SFAS 50 and 55.

ABSTRAK

PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010. Tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui kendala dan dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 pada laporan keuangan perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal sejumlah 31 bank. Penelitian ini dilakukan dengan periode amatan 2009 sd 2014 Maka selama 6 tahun adalah jangka waktu observasi, sehingga datanya berjumlah 186 laporan keuangan dalam bentuk annual report. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (*collective impairment*). Selain itu kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sistem informasi, kebijakan akuntansi, ketersediaan data, sumber daya manusia, komparabilitas laporan keuangan, ketersediaan data, *feeding* data dan waktu pelaporan.

Kata Kunci: PSAK No. 50 (Refisi 2006), PSAK No. 55 (Refisi 2006), dampak penerapan PSAK 50 and 55.

1. PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (PAPI, 2008)

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan acuan standar yang berlaku umum di Indonesia seperti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), *International Accounting Standard (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS)*, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan dan lain-lain. PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan bagian standar yang diterapkan pada penyusunan laporan keuangan perbankan.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai penerapan dan dampak implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 pada laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dimana penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif yang dimulai. (BRI, 2010). Sehingga pada pelaksanaannya terdapat perbedaan dan dampak yang diakibatkan dari penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 di Laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008) kebijakan akuntansi Umum, kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
 - 2) Mengambarkan substansial ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) Mencakup semua hal yang material

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

- a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan
- c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

2.2 State of the Art

Penelitian, Murdianingrum (2005) sudah melakukan penelitian pendahuluan yaitu dampak analisis pengaruh struktur modal dan tipe kepemimpinan perusahaan terhadap kelengkapan laporan keuangan.

IFRS memiliki karakteristik yang berbeda dengan standar akuntansi yang sebelumnya digunakan. Menurut Suwardjono (2011) bahwa standar akuntansi mempunyai implikasi terhadap kehidupan ekonomik, *business*, dan sosial. Teori akuntansi berperan dalam tahap pemilihan konsep teknik, dan metoda dalam penyusunan standar untuk mencapai tujuan tertentu. Karena akuntansi bersifat utilitarian, praktik akuntansi yang diterapkan harus didasarkan pada analisis kos dan manfaat untuk wilayah (negara) diterapkannya standar tersebut. Dengan kata lain, praktik akuntansi sebagai manifestasi pelaksanaan standar semestinya harus mengarahkan atau membantu ke pencapaian tujuan negara. Di Amerika, ketika menyusun rerangka konseptual, FASB menetapkan tujuan pelaporan keuangan atas dasar kondisi dan lingkungan di Amerika. Rerangka konseptual harus dirancang untuk kepentingan negara, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan dan investor. Oleh karena itu, rerangka konseptual mestinya harus direkayasa dengan seksama dalam rangka mencapai tujuan negara.

2.3 Adopsi IFRS

International Accounting Standard (IAS) adalah Standar Akuntansi Internasional untuk pelaporan keuangan yang disusun oleh *International Accounting Standard Committee* (IASC). Sejak 1 April 2001, *International Accounting Standard Board* (IASB) melanjutkan peran IASC dalam penyusunan standar dan mulai menerbitkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Penting untuk membedakan antara adopsi IFRS atau konvergensi IFRS. Sedangkan Konvergensi adalah mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi banyak ditemukan di negara berkembang, (Nobes, 2010). Walaupun bukan merupakan adopsi penuh, konvergensi menunjukkan perbedaan yang minimal dengan IFRS. Perbedaan yang ada biasanya dalam hal waktu penerapan atau sedikit pengecualian dalam pengaturan standar tertentu. Pada kenyataannya beberapa negara akan mengalami kesulitan untuk melakukan adopsi IFRS secara penuh. Kendala yang mungkin dihadapi antara lain perangkat hukum, tata kelola dan juga budaya. Chen, Ding, dan Xu (2009).

Hasil penelitian berkaitan dengan adopsi IFRS untuk negara-negara Asia dilakukan oleh Suryaningsum (2012, 2013) menyatakan bahwa negara-negara yang mengadopsi IFRS memiliki kualitas laporan keuangan yang tidak berbeda dengan kualitas laporan keuangan sebelum dilakukan adopsi. Format dan bentuk saja yang membedakan laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Keberadaan standar akuntansi lokal yang mengadaptasi standar internasional (DSTD) menunjukkan kecenderungan negara tersebut akan mengadopsi IFRS. Keberadaan standar akuntansi lokal yang mengadaptasi internasional tidak dapat selalu menjadi dasar yang kuat bahwa negara tersebut akan mengadopsi IFRS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk seluruh perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada April 2014 ini (saat proposal ini dibuat) adalah sejumlah 31 bank. Penelitian ini dilakukan dengan perioda amatan 2009 sd 2014 (tahun 2014 adalah diterbitkannya laporan keuangan tahun 2013). Maka selama 6 tahun adalah jangka waktu observasi, sehingga datanya berjumlah 186 laporan keuangan dalam bentuk annual report. 1 annual report yang diterbitkan perusahaan memiliki jumlah halaman sekitar 300 sd 500 halaman. Sehingga data riset dilakukan terhadap 335.200 sd 670.400 halaman.

4. PEMBAHASAN

Perubahan Mendasar dan Analisis Dampak PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Menurut Bank Mandiri (2010), perubahan mendasar dan analisis dampak PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006):

1. Klasifikasi

Aset keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi *Fair Value Through Profit/Loss* (FVPTL), *Held to Maturity* (HTM), *Available for sale* (AFS) dan *Loan & Receivables*. Kewajiban keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi FVTPL dan *Other Liabilities*. Implikasinya adalah bank-bank harus mereview klasifikasi seluruh instrumen keuangan yang dimiliki per tanggal 1 Januari 2010 sesuai dengan intensi dan kemampuan financial bank, serta berdasarkan karakteristik aset dan kewajiban keuangan dimaksud. Hal ini menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk masing-masing instrumen keuangan tersebut.

2. *Effective Interest Rate*

Berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), pendapatan bunga dan biaya bunga instrumen keuangan diakui sebesar *effective interest rate* (EIR). Apabila dalam suatu perolehan instrumen keuangan terdapat biaya transaksi dan/ atau *fee* yang terkait langsung (*attributable*) dengan perolehan tersebut, maka EIR instrumen keuangan harus dihitung dengan memasukkan komponen biaya transaksi dan/atau *fee* tersebut. Biaya transaksi dan *fee*, antara lain adalah sebagai berikut: pendapatan provisi kredit, denda/penalti atas opsi pelunasan sebelum jatuh tempo, *fee* kepada karyawan atas aplikasi kredit yang disetujui, biaya hadiah yang diberikan atas setiap aplikasi deposito. Implikasi atau dampaknya yaitu: bank harus mengidentifikasi biaya dan *fee* yang dapat dikategorikan sebagai biaya transaksi, bank harus menentukan tingkat materialitas biaya transaksi dan *fee* yang terkait langsung (*attributable*) yang harus diamortisasi dengan metode EIR.

3. *Fair Value*

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah kuotasi di pasar yang aktif, yaitu *bid price* untuk aset keuangan dan *ask price* untuk kewajiban keuangan. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Dampak atau implikasinya: bank harus melakukan *mark to market* aset keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL atau AFS dengan menggunakan *bid price* dan kewajiban keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL dengan menggunakan *ask price*, bank perlu menyesuaikan sistem yang dimiliki.

4. *Impairment*

Perbedaan perhitungan PPA / CKPN:

- PPA berdasarkan PBI : PPA umum wajib di bentuk sebesar 1% dari baki debit.
- PPA khusus wajib dibentuk berdasarkan tingkat kolektibilitas dengan memperhatikan prinsip 3 pilar.

CKPN berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

- Tidak terdapat ketentuan pembentukan PPA umum
- Harus mengidentifikasi adanya bukti objektif penurunan nilai dan melakukan impairment test untuk menentukan kerugian penurunan nilai aset
- Impairment test untuk aset keuangan yang individual signifikan, dilakukan secara individual dan aset keuangan yang tidak individual signifikan dilakukan secara kolektif.

Dampak terhadap Bank Secara Umum pada penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006)

Menurut Bank Mandiri, (2010), dampak terhadap bank secara umum pada penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006):

1. **Laporan Keuangan:** berdampak signifikan pada laporan keuangan perbankan karena terdapat perubahan cara pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.
2. **People / organization:** perlu meningkatkan *awareness* dan pemahaman seluruh organisasi terhadap ketentuan-ketentuan pada PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) melalui sarana training dan sosialisasi, perlu melibatkan hampir seluruh unit kerja karena penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) mempengaruhi hampir seluruh transaksi maupun produk perbankan.
3. **Business Process:** berdampak pada proses bisnis karena perlu penyesuaian prosedur dan kebijakan dalam menentukan nilai wajar, *recognition* dan *derecognition* instrumen keuangan serta perhitungan pencadangan kerugian penurunan nilai.
4. **Policy:** perlu mengidentifikasi dan mengkaji perubahan kebijakan akuntansi serta kebijakan terkait lainnya, sehubungan dengan pemberlakuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), perlu menyesuaikan kebijakan terkait lainnya sesuai perubahan tersebut.
5. **Sistem:** perlu mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan sistem untuk mendukung penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), termasuk identifikasi kebutuhan data, melakukan pengembangan sistem untuk mendukung penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006).

Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) pada Perbankan

Ketentuan transisi atas penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dilaksanakan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman di bawah ini:

1. Perhitungan Suku Bunga Efektif

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

2. Penghentian Pengakuan

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006).

3. Instrumen Keuangan Majemuk

instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).

4. Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).

5. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada awal tanggal 1 Januari 2010.

Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015 (Studi Kasus pada Bank BRI)

No	PSAK Baru	PSAK Lama	Pokok-Pokok Perubahan	Dampak ke BRI
1	PSAK 50 (2014) : Instrumen Keuangan : Penyajian	PSAK 50 (2010) : Instrumen Keuangan : Penyajian	<p>Penyesuaian ruang lingkup mengacu pada PSAK yang telah mengatur secara khusus (contoh : PSAK 68).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman aplikasi atas kriteria saling hapus aset dan liabilitas keuangan. 2. Memberikan pedoman aplikasi atas kriteria penyelesaian neto. 3. Berlaku ketentuan transisi secara retrospektif. 	<p>BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang disyaratkan. Sampai saat ini, BRI telah mengadopsi perlakuan kriteria saling hapus dan penyelesaian neto jika dan hanya jika BRI memiliki kekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan maksud penyelesaian secara neto untuk merealisasi aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.</p>
2	PSAK 55 (2014) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	PSAK 55 (2010) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	<p>Penyesuaian ruang lingkup mengacu pada PSAK yang telah mengatur secara khusus (contoh : PSAK 68).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksi. Mengatur penjelasan mengenai pengukuran reklasifikasi derivatif melekat. Mengatur kualifikasi item lindung nilai, 2. penghentian instrumen lindung nilai, penilaian efektifitas lindung nilai dan periode pengakuan lindung nilai atas arus kas. Berlaku ketentuan transisi secara retrospektif. 	
3	PSAK 60 (2014) : Instrumen Keuangan: Pengungkapan	PSAK 60 (2010) : Instrumen Keuangan: Pengungkapan	<p>Penyesuaian ruang lingkup mengacu pada PSAK yang telah mengatur secara khusus (contoh : PSAK 68)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan bagi entitas yang memenuhi persyaratan saling hapus. 2. Pengungkapan yang disyaratkan untuk penghentian keseluruhan dan sebagian. 3. Berlaku ketentuan transisi secara retrospektif. 	<p>BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan standar yang disyaratkan, diantaranya peningkatan pengungkapan atas nilai wajar dan risiko likuiditas. Termasuk pula penyesuaian modifikasi ke sistem informasi dan pengendalian internal terkait syarat pengungkapan serta pertimbangan manajemen tentang tingkat signifikansi input dalam pengukuran nilai wajar.</p>

Dampak Penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) Terhadap Perbankan di Indonesia

Dalam Bank Indonesia (2010), pada awalnya PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010 sesuai dengan pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008.

Sebagai entitas yang mayoritas struktur neracanya terdiri dari aset keuangan dan kewajiban keuangan, implementasi PSAK 55 dan 50 akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perbankan dibandingkan entitas pelapor lainnya dengan struktur neraca yang tidak didominasi oleh instrumen keuangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (*collective impairment*). Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan DSAK-IAI dan Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (DSPAP)-IAI memberikan masa transisi khusus yang secara standar akuntansi dimungkinkan. Bagi bank yang belum memiliki data kerugian historis yang cukup dan belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai untuk menentukan besarnya *collective impairment*, maka pembentukan *collective impairment* dapat mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sampai dengan 31 Desember 2011. Adapun bank yang tidak memiliki keterbatasan wajib tetap menerapkan perhitungan *collective impairment* sesuai PSAK 55.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan secara cukup mendasar dalam metode pengukuran dan klasifikasi instrumen keuangan yang berdampak pada perlakuan akuntansi di bank. Klasifikasi instrumen keuangan menjadi Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi yang sebelumnya hanya ada untuk surat berharga, saat ini diterapkan untuk seluruh instrumen keuangan, termasuk kredit.

Tantangan juga dihadapi bank untuk kredit, yang merupakan instrumen keuangan yang signifikan di perbankan. Kredit kemungkinan besar akan masuk dalam kategori Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang (*Loan and Receivables*) yang diukur dengan cara harga perolehan yang diamortisasi (*amortised cost*). Untuk itu, bank perlu melakukan penyesuaian pengukuran dari semula berdasarkan baki debit menjadi berdasarkan *amortised cost*.

Selain itu, penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS belum sepenuhnya mengadopsi kepentingan kehati-hatian perbankan. Cadangan yang dibentuk adalah sebesar selisih antara estimasi arus kas awal dengan estimasi arus kas setelah terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Sementara itu, sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, pembentukan cadangan didasarkan baik pada *incurred loss* maupun *expected loss* sehingga modal bank diharapkan dapat menutup potensi kerugian yang terjadi. Untuk menjembatani hal tersebut, perhitungan cadangan sesuai ketentuan Bank Indonesia akan digunakan dalam konteks perhitungan modal, sementara untuk penyajian laporan keuangan bank tetap menghitung cadangan sesuai PSAK.

Untuk memantau persiapan bank dalam menerapkan PSAK 55, Bank Indonesia telah meminta bank untuk menyampaikan *action plan* baik dalam aspek sumber daya manusia, sistem maupun proses. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan *on site visit* ke beberapa bank untuk melihat secara langsung persiapan yang dilakukan oleh bank.

Kendala-kendala Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Beberapa kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Informasi

- a. Dalam proses implementasi sistem IT sesuai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), berdasarkan kesanggupan rekanan, diketahui bahwa pengembangan sistem yang digunakan untuk penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) minimal membutuhkan waktu selama 6 bulan.
- b. Tidak terdapat bank di Indonesia yang dapat dijadikan benchmark dalam menerapkan sistem IT yang sudah sesuai dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).
- c. Diperlukan pemahaman yang memadai untuk dapat memastikan bahwa sistem IT yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).
- d. Untuk mendapatkan hasil perhitungan *Probability of Default* (PD) sesuai *best practice*, harus dikembangkan sistem *risk management* terlebih dahulu agar tidak terjadi duplikasi dalam pengembangan sistem.

2. Kebijakan Akuntansi

- a. Perlu disusun kebijakan akuntansi masing-masing bank yang sesuai dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya..
- b. Perlu dilakukan simulasi terhadap metodologi yang akan ditetapkan pada kebijakan akuntansi.

3. Ketersediaan Data

Bank atau perusahaan harus memastikan ketersediaan data untuk melakukan perhitungan-perhitungan sesuai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) sebagai berikut:

➤ *Effective Interest Rate* (EIR)

Untuk dapat menghitung EIR instrumen kredit diperlukan data, sebagai berikut:

Data estimasi arus kas kontraktual kredit s.d. jatuh tempo (pokok dan bunga), Biaya transaksi dan pendapatan yang teratribusi langsung terhadap perolehan kredit, Jangka waktu kredit (*start date* dan *due date*), Suku bunga kontraktual, Baki debit kredit.

Apabila data tersebut belum tersedia di sistem, perlu dilakukan *enhancement*

➤ *Fair Value*

Untuk dapat mengukur nilai wajar instrumen keuangan (*mark to market*), diperlukan data *bid price* untuk aset keuangan dan *ask price* untuk kewajiban keuangan..

➤ *Collective Impairment*

Untuk dapat menghitung *Collective Impairment* instrumen kredit diperlukan data historis kredit minimum selama 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:

Data historis kualitas kredit yang tercermin pada rating atau kolektibilitas, Data *carrying value* kredit (nilai tercatat kredit), Data kredit hapus buku, Data *recovery* dari kredit hapus buku, Data *bucket* tunggakan kredit, *Data Loss Identification Period* (LIP).

Apabila data tersebut belum tersedia di sistem, perlu dilakukan *enhancement*.

➤ *Individual Impairment*

Untuk dapat menghitung *individual impairment* instrumen kredit diperlukan data sebagai berikut:

Data estimasi arus kas untuk kredit yang secara individual signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai (*discounted cash flow method*), Data nilai pengikatan agunan dan data nilai wajar agunan, termasuk estimasi waktu likuidasi, estimasi biaya-biaya likuidasi serta dokumen legal (*fair value of collateral method*), Data suku bunga kontraktual, Data suku bunga pasar, Data EIR per rekening, Data rating per rekening atau peer debitur, Data *carrying value* kredit (nilai tercatat kredit).

Untuk memperoleh data tersebut di atas diperlukan waktu dan *effort* yang cukup besar dan apabila data belum tersedia, perlu dilakukan *enhancement*.

4. Sumber Daya Manusia

Meskipun selama ini telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, namun akibat kompleksitas PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), pemahaman seluruh organisasi masing-masing bank dalam menerapkan PSAK tersebut masih belum cukup memadai.

5. Komparabilitas Laporan keuangan

Perlu dipahami bagaimana pengaruh penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap komparabilitas laporan keuangan yang disusun masing-masing bank, mengingat ruang yang diberikan dalam penetapan kriteria, seperti aset yang termasuk *impaired*, *fee* yang harus diamortisasi dan lain-lain, cukup luas.

6. Kendala-Kendala lain yang Perlu Diperhatikan

- Proses pengumpulan data untuk melakukan perhitungan *loan impairment* memerlukan waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan.
- Belum terdapat peraturan perpajakan yang telah disesuaikan dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

Kendala-kendala Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Disamping harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan publikasi, perbankan diharuskan untuk menyusun Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), dimana terdapat beberapa kendala dalam pelaporan LBU jika menggunakan data hasil penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan data

Dengan belum tersedianya data hasil penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) secara memadai, dapat berakibat pada ketidakakuratan pengisian field pelaporan LBU 2008.

2. Feeding Data

- Sistem feeding data, khususnya yang terkait dengan carrying value loan dan hasil perhitungan loan impairment, baik yang dihitung secara individual maupun yang dihitung secara kolektif ke dalam form LBU 2008 perlu dikembangkan.
- Mengingat penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) masih belum dilakukan secara sistem, maka berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses feeding data untuk dilaporkan dalam format LBU 2008.

3. Waktu pelaporan

Proses penyusunan laporan keuangan lebih lama dikarenakan adanya proses bisnis baru dan masih terdapat proses manual yang dilakukan terkait dengan penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

5. KESIMPULAN

PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010 sesuai dengan pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (*collective impairment*). Selain itu kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sistem informasi, kebijakan akuntansi, ketersediaan data, sumber daya manusia, komparabilitas laporan keuangan, ketersediaan data, *feeding* data dan waktu pelaporan.

6. REFERENSI

-
- Bank Indonesia. 2010. Dampak Penerapan PSAK 55 (revisi 2006) Terhadap Perbankan di Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan No. 15, September 2010. Bank Indonesia: Jakarta
- Bank Mandiri. 2010. Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006). Diskusi Implementasi PSAK Baru Antara BUMN dan Tim IFRS IAI, Bandung.
- Chen, Ding, Xu. 2009. Convergence of Accounting Standards and Foreign Direct Investment. working paper
- Marita. 2008 Pengaruh Komitmen dan Peran Informasi Manajemen Biaya Dalam Mendukung *Total Quality Management* Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya dan Implikasinya Terhadap Kinerja Manajer (Survei terhadap Manajer Divisi pada BUMN Manufaktur di Indonesia) PDM Dikti
- Marita. 2010 Model Corporate Reporting Supply Chain untuk Sektor Industri energi berdasarkan Karakteristik Negara: Pemetaan dan Komparasi pada Perusahaan-perusahaan Sektor Industri Energi di Kawasan Asia LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta
- Marita. 2012 Analisis Kemampuan Karyawan dalam Pemakaian Informasi Berbasis Komputer Dalam Proses Penelitian
- Marita. 2011 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UKM dan UMKM di Wilayah DIY Kadin DIY
- Murdianingrum, Sri Luna. 2005. Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Akuntansi dengan Kecerdasan Emosional. *Media Akuntansi*.
- Murdianingrum, Sri Luna. 2005. Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Tipe Kepemimpinan Perusahaan terhadap Kelengkapan L/K. *Jurnal Ekonomi FE UKI*
- Nobes, C. Parker, R. (2010). *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, 11th edition. England 21
- Suryaningsum, Sri. 2012. The Impact of IFRS Adoption on Earnings Management. AAAA Prooceding. Kyoto University.
- Suryaningsum, Sri. 2013. Dampak Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba serta Konsekuensinya Terhadap Daya Deteksi Auditor. Disertasi UGM.
- www.IASplus.com, official website
- www.pwc.com, IFRS adoption by country
- www.bi.go.id